

# ISU Sepekan

**BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

*Minggu ke 4 Bulan September 2021 (17 s.d. 23 September)*



**Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

## PERBAIKI PELAYANAN VAKSINASI SERTA KOORDINASI DISTRIBUSI VAKSIN

Sidiq Budi Sejati  
Peneliti Pertama/Politik Dalam Negeri  
sidiq.sejati@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Ombudsman masih menemukan adanya permasalahan dalam proses pelayanan vaksinasi Covid-19 yang berjalan saat ini. Masalah tersebut diantaranya terkait dengan pendataan masyarakat yang telah divaksinasi dengan penerbitan sertifikat vaksin dan ketidaksesuaian data pada sertifikat. Selain itu Ombudsman juga masih menemukan kerumunan di sentra lokasi vaksinasi. Penyelenggara seharusnya dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga masyarakat dapat lebih nyaman saat mengikuti proses vaksinasi.

Selain permasalahan pendataan dan pelaksanaan vaksinasi, Ombudsman juga menemukan permasalahan pada proses distribusi vaksin. Ombudsman masih menemukan stok vaksin yang menumpuk pada satu daerah karena masyarakatnya masih banyak yang menolak mengikuti program vaksinasi. Sementara di daerah yang masyarakatnya memiliki antusiasme tinggi dalam mengikuti vaksin menyatakan kekurangan stok vaksin. Permasalahan selanjutnya adalah penyalahgunaan vaksin dosis ketiga atau vaksin *booster* oleh oknum tertentu. Seperti yang diketahui bahwa vaksin dosis ketiga saat ini hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan (*nakes*) dan bukan untuk *nonnakes* atau masyarakat umum.

Ditengah harapan pemerintah untuk mempercepat cakupan vaksinasi dan kesadaran masyarakat yang sudah mulai banyak tereduksi tentang manfaat vaksinasi seharusnya pemerintah segera mengimbangi perbaikan pada proses pelayanan vaksinasi. Jangan sampai antusiasme masyarakat yang sudah mulai membaik kembali kendur karena pemerintah terlihat tidak siap dalam menyikapi perubahan. Pemerintah daerah seharusnya meningkatkan sosialisasi dan edukasi dimana masyarakatnya masih banyak yang enggan untuk melakukan vaksinasi.

Terkait masalah koordinasi, pemerintah daerah harus segera melaporkan kondisi penggunaan vaksin di daerahnya kepada pemerintah pusat sedangkan pemerintah pusat harus cepat merespon dengan segera memverifikasi laporan tersebut. Setiap pemerintah daerah perlu cermat dalam menghitung perbandingan kebutuhan vaksin dengan antusiasme masyarakat yang ingin di vaksin pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi di daerahnya. Hal ini menyangkut terkait stok vaksin dan kondisi ketahanan vaksin dengan pertimbangan kondisi kemasan vaksin. Jangan sampai stok vaksin menumpuk pada salah satu fasilitas pelayanan kesehatan atau terbuang percuma karena tidak terpakai. Begitu juga dengan penggunaan vaksin ketiga agar dapat dilakukan pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

### SUMBER

Kompas.com, 21 September 2021.